



Buletin Parlamentaria

Nomor 1014/I/VII/2018 • Juli 2018



Indonesia - Timor Leste Komitmen Tingkatkan Hubungan Bilateral

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



9 772614 339005

RUU Penyadapan Akan Ditata Komprehensif



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Pimpinan DPR RI saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo di Gedung DPR RI

Indonesia – Timor Leste Komitmen Tingkatkan Hubungan Bilateral

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/06) mengatakan, kedua negara telah menunjukkan wujud nyata dalam bekerjasama di berbagai forum internasional.

Kerjasama antara Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste telah berlangsung baik dan akan terus ditingkatkan. Layaknya hubungan persaudaraan, kedua negara berkomitmen akan saling memberikan dukungan dan

terus bergandeng tangan untuk masa depan kedua negara dan masyarakat.

“Saya yakin kehadiran Presiden Guterres dapat meningkatkan kembali kerjasama kita baik di level parlemen maupun eksekutif pemerintahan,” jelas Bamsuet, sapaan akrabnya, dalam

pertemuan yang juga dihadiri sejumlah Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta para menteri di Republik Demokratik Timor Leste.

Bamsuet menuturkan, pemilihan Indonesia sebagai negara pertama dalam kunjungan luar negeri Presiden Timor Leste Guterres merupakan sebuah penghormatan dan simbol positif bahwa kedua negara senantiasa punya itikad baik untuk bertetangga secara harmonis.

“Indonesia dan Timor Leste punya hubungan yang tak bisa dipisahkan. Sejarah mencatat Timor Leste pernah menjadi provinsi termuda di Indonesia.



Foto: Jakarta/od

Sejak tahun 1999, Timor Leste akhirnya menjadi negara merdeka. Namun hubungan persaudaraan keduanya tak akan bisa dipisahkan hanya karena sekat perbedaan negara,” ujar Bamsuet.

Politisi Partai Golkar ini juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Timor Leste kepada Indonesia sehingga bisa menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2022. Sebaliknya, Indonesia akan mendukung penuh pencalonan Timor Leste dalam keanggotaan ASEAN.

Bamsuet menambahkan, pentingnya hubungan Indonesia - Timor Leste antara lain juga telah diwujudkan dalam pembangunan 3 Pos Lintas Batas (PLB) yaitu, PLB

Motain di Kabupaten Belu, PLB Motamasin di Kabupaten Malakad dan PLB Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara. Ketiga PLB tersebut telah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 dan diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara.

Hingga tahun 2017, tercatat nilai perdagangan kedua negara mencapai 229,99 dolar AS. Di tahun yang sama, nilai investasi Indonesia di Timor Leste mencapai 595,39 juta dolar AS yang tersebar di bidang infrastruktur, energi, keuangan dan perbankan, obat-obatan serta alat kesehatan.

“Saya harap, di bawah pemerintahan Presiden Guterres dapat mendorong peningkatan iklim investasi disana. Saat ini terdapat sekitar 14 BUMN dan lebih dari 400 perusahaan Indonesia yang beroperasi di Timor Leste. Mudah-

mudahan jumlahnya akan terus meningkat,” urai Bamsuet.

Di bidang pendidikan dan pembangunan manusia, hingga saat ini, sudah ada 12.000 mahasiswa dari Timor Leste yang belajar di Indonesia, baik melalui jalur beasiswa maupun dengan biaya sendiri. Sebaliknya, jumlah pelajar dari Indonesia di Timor Leste sudah mencapai sekitar 2.107 dengan jumlah WNI yang tinggal dan bekerja di sana hampir 9.000 jiwa.

“Saya mengapresiasi kunjungan Presiden Guterres ke Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 28 Juni lalu. DPR RI mendukung dan bahkan siap memfasilitasi rencana kerja sama antara Timor Leste dengan IPB. Khususnya, di bidang pendidikan pertanian, penelitian, dan pengembangan teknologi pertanian. Indonesia akan sangat senang sekali apabila bisa ikut serta memajukan Timor Leste melalui peningkatan pembangunan manusia melalui jalur pendidikan,” jelas Bamsuet.

Senada dengan Bamsuet, Presiden Guterres juga menyatakan tekadnya untuk senantiasa bergandengan tangan dengan Indonesia. Bahkan beliau menginginkan parlemen Timor Leste bisa belajar banyak dan bertukar pikiran dengan parlemen Indonesia.

“Timor Leste senang dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang baru saja menyelesaikan pemilihan kepala daerah secara damai. Tahun depan juga akan menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden, saya yakin akan berjalan dengan kondusif. Ini menjadi pelajaran penting bagi Timor Leste dalam membangun konsolidasi berbangsa dan bernegara,” pungkaskan Presiden Guterres.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha.

Sedangkan Presiden Francisco Guterres didampingi Minister for Foreign Affairs and Coperation Mr. Dionisio Da Costa Babo Soares, Chief of Civil House Mr. Francisco Maria de Vasconcelos, Chief of Defence Force Major General Tito da Costa Cristovao, Chief of Military House Colonel Antonio Soares da Silva. ■ ann/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Geraldi Opie

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Posisi Indonesia Sangat Penting Bagi Timor Leste

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, kunjungan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo ke Indonesia, menunjukkan bahwa posisi Indonesia bagi Timor Leste adalah negara yang sangat penting, karena langsung berbatasan dengan Indonesia.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Hal itu ia sampaikan saat mendampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan Presiden Timor Leste yang pertama kali ke Indonesia, sejak ia terpilih menjadi Presiden pada tahun lalu. Hadir dalam pertemuan itu sejumlah Pimpinan dan Anggota DPR RI.

“Selain itu, juga disampaikan bagaimana posisi strategis Indonesia bagi Timor Leste. Banyak persoalan historis yang dekat antara kedua negara. Saya kira itu adalah *gesture* politik yang bagus bagi hubungan diantara kedua negara yang memang sudah cukup bagus,” ucap Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6).

Politisi Partai Gerindra itu menilai, meskipun hubungan antar kedua negara saat ini sudah relatif baik, namun masih banyak hal yang bisa untuk ditingkatkan lagi.

Terkait upaya Timor Leste yang ingin dapat bergabung menjadi bagian dari negara - negara Anggota ASEAN, Fadli menegaskan bahwa sejak dahulu Indonesia sudah dalam posisi mendukung Timor Leste yang ingin menjadi Anggota ASEAN.

“Di Parlemen juga mereka menjadi calon anggota ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Memang kita dalam posisi mendukung mereka menjadi Anggota ASEAN,” pungkasnya. ■ dep/sf

“Kita pernah menggapai kesuksesan saat menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962. Insya Allah kesuksesan tersebut akan kembali terulang pada 2018 ini. Mari bersama kita dukung para atlet Indonesia untuk bisa meraih medali emas sebanyak-banyaknya. Tak kalah penting, sebagai tuan rumah kita harus mampu memberikan jamuan dan keramahan kepada seluruh peserta dari manca negara,” ujar Bamsuet, sapaan akrabnya saat menerima Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) Eric Thohir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).

Politisi Partai Golkar ini berharap Indonesia akan sukses dalam penyelenggaraan sebagai tuan rumah dan sukses dalam prestasi sebagai peserta Asean Games. Melalui Asean Games, Indonesia diharapkan juga sukses dalam pemberdayaan ekonomi sebagai sebuah industri serta sukses administrasi sebagai pengguna anggaran negara.

“Saya yakin dengan adanya Asian Games ini, roda ekonomi nasional akan bergerak cepat. Dari mulai perhotelan, transportasi, makanan/minuman, telekomunikasi, pariwisata, hiburan, perbankan, kesehatan, sarana dan prasarana olahraga, sampai ke pelaku UMKM yang turut terlibat dalam perhelatan Asian Games. Pergerakan roda ekonomi ini tentu pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” terang Bamsuet.

Dalam rangka memeriahkan rangkaian acara, Bamsuet direncanakan akan menyambut pawai Obor Asian Games di patung Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali pada 24 Juli 2018. Api obor Asian Games yang diambil dari Stadion Nasional Dhyana Chand, New Delhi, India sebagai tuan rumah Asian Games pertama pada 1951 ini akan dibawa berkeliling Indonesia.

Selepas pengambilan api dari India pada 15 Juli 2018, api Asian Games akan tiba di Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah pada 18 Juli 2018. Selanjutnya akan melintasi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua Barat. Berlanjut ke Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan menyeberang ke Pulau Sumatera yang dimulai dari Aceh.

“Saya yakin rangkaian perjalanan pawai Obor Asian Games 2018 keliling Nusantara akan mampu mendongkrak citra dan roda perekonomian di berbagai daerah yang dilalui maupun daerah sekitarnya. Pawai obor ini akan diliput media massa internasional, saya yakin pemerintah



Foto: Jaka/od

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) Eric Thohir

Ketua DPR Minta Semua Elemen Masyarakat Berpartisipasi Sambut Asian Games

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyakini perhelatan Asian Games XVIII di Jakarta dan Palembang mampu mengangkat harkat, derajat, dan martabat Indonesia di mata dunia. Karena itu, dirinya meminta segenap elemen bangsa berpartisipasi untuk menjadi tuan rumah yang baik, memberikan kenyamanan kepada para atlet, official maupun para supporter dari berbagai negara yang datang ke Indonesia.

daerah serta para *stakeholder* terkait mampu menangkap peluang ini untuk mempromosikan destinasi pariwisata, seni budaya serta berbagai potensi daerah yang belum terekspos,” jelasnya Bamsuet.

Sebelum mengakhiri pertemuan dengan Erick Thohir, Bamsuet memberikan jaminan bahwa DPR RI senantiasa akan membantu kerja INASGOC. Baik dari segi penggunaan

anggaran negara maupun dari segi koordinasi lembaga negara demi suksesnya penyelenggaraan Asian Games.

“Saya minta setiap anggota DPR RI menjadi *public relation* (PR) mempromosikan Asian Games ke masyarakat, terutama di dapilnya masing-masing. Penyelenggaraan Asian Games ini atas nama Bangsa dan Negara Indonesia, bukan atas nama kelompok

tertentu. Semua pihak harus membantu mempromosikannya agar masyarakat tergerak untuk memberikan dukungannya terhadap perhelatan Asean Games serta mendukung atlet kita yang bertanding. Jadikan keterlibatan kita bersama dalam kesuksesan Asian Games sebagai wujud bela negara dan cinta terhadap tanah air,” pungkas Bamsuet. ■ ann/sf

Terima Aspirasi Kepala Desa Bogor, Fadli Zon Dukung Pemekaran



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Bersama Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor



Foto: Rumi/zod

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung upaya dan langkah pemekaran Kabupaten Bogor, mengingat sangat padatnya penduduk Kabupaten Bogor sehingga pemekaran adalah langkah untuk mempercepat pembangunan. Demikian disampaikan Fadli Zon saat menerima silaturahmi Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor, Jumat (22/6).

“Bogor jadi kabupaten yang cepat pertumbuhan penduduknya, tidak saja karena kelahiran tapi juga migrasi.

Kabupaten Bogor terbesar penduduknya di Indonesia. Mengalahkan banyak provinsi. Sudah seharusnya Kabupaten Bogor dipisah karena sudah sangat padat. Ini jadi kebutuhan pemekaran ini,” ungkap Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Lanjut Fadli, upaya pemekaran Kabupaten Bogor harus segera dipertajam. Paling tidak saat ini yang sudah siap adalah Bogor Barat. “Dengan adanya DOB ini memungkinkan percepatan pembangunan,” sambung Fadli.

Silaturahmi sekaligus halal bihalal ini pun berlangsung secara harmonis dan dipenuhi canda tawa, momen ini pun membuat Fadli Zon bernostalgia di masa lalunya. Hal ini karena Fadli banyak menghabiskan waktu kecilnya di Bogor, tepatnya di Kecamatan Cisarua.

Fadli juga berbagi pengalamannya saat masa kecil yang mengenyam pendidikan SD dan SMP di Bogor hingga dapat menyelesaikan kuliahnya di London School of Economic di Inggris. Cerita pengalaman masa mudanya ini yang menjadi inspirasi bagi para hadirin.

Dalam kesempatan ini juga Fadli menegaskan akan selalu menerima berbagai macam aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bogor dan akan memperjuangkannya di pemerintah pusat. Karenanya dirinya mendorong adanya aspirasi yang disampaikan pada dirinya.

“Saya selalu memperjuangkan segala bentuk aspirasi yang disampaikan pada saya. Biasanya aspirasi masuk itu mengenai fasilitas umum, jalan, dan lain-lain. Biasanya saya langsung mengirimkan surat aspirasi tersebut ke kementerian terkait dan saya kawal untuk tindaklanjutnya,” tegas Fadli.

Kegiatan silaturahmi antara Fadli Zon dengan Kepala Desa se Kabupaten Bogor ini diakhiri dengan sesi foto bersama. Sebelumnya Kepala Desa tersebut sudah melakukan *tour building* ke beberapa titik di DPR seperti Museum dan Ruang Paripurna. ■ hs/sc



Foto: Andri/zod

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom

Korsel Dinilai Perhatikan Hubungan dengan Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima kunjungan Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom. Kim merupakan dubes yang baru saja dilantik, namun sebelumnya pernah bertugas di Indonesia. Dalam diskusi kedua belah pihak membicarakan soal pekerja migran Indonesia yang ada di Korsel serta upaya perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara. Fahri menilai Korea Selatan relatif makin serius menjalin hubungan dengan Indonesia.

“Memang Korea Selatan ini relatif makin serius untuk memperhatikan Indonesia, karena itu dubes barunya, ini adalah bekas pejabat lama Kim Chang yang pernah bertugas di Indonesia, sehingga dia bisa berbahasa Indonesia dan relatif sudah kenal Indonesia,” papar Fahri di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).

Fahri juga mengungkapkan rasa terimakasihnya, karena yang ditugaskan menjadi dubes di Indonesia merupakan pejabat yang sudah pernah bertugas dan kenal Indonesia. Dia berharap mudah-mudahan dengan cara itu, Dubes Korsel yang baru bisa bekerja lebih baik dan memulai lebih cepat. Fahri juga menegaskan agar hubungan antara Korsel

dengan Indonesia semakin solid dan produktif.

“Sebab ada perkembangan-perkembangan baik antara kedua negara. Di kita (Indonesia), investasi mereka semakin mantap,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Selain itu Fahri juga berterimakasih, karena di Korsel ada pekerja-pekerja migran Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu, dan pekerja migran tersebut menikmati gaji dan pelayanan yang cukup baik. Korsel merupakan salah satu tujuan favorit pekerja migran Indonesia. Korsel juga telah membantu meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia.

“Mereka bilang tadi pekerja Indonesia itu sangat giat, sangat tekun sangat rajin. Dan juga di sektor perikanan terutama

sangat banyak oleh sebab itu pelatihan dan peningkatan *skill* mereka juga sedang ditingkatkan. Saya mengatakan sebagai Ketua Tim Pengawas TKI, saya mengucapkan terimakasih, atas segala bantuan yang ada selama ini. Karena itu sangat membantu pekerja migran kita," apresiasi Fahri.

Terkait dengan upaya perdamaian di semenanjung Korea, Fahri menyampaikan dukungannya. Indonesia mendukung pertemuan bilateral antara Korea Utara dengan Korea Selatan demi menciptakan perdamaian di semenanjung Korea.

"Karena kami percaya apabila Korea

Selatan bisa menuntun Korea Utara menjadi lebih demokratis, tentu juga kita di Indonesia senang. Sehingga masyarakatnya semakin terbuka, ekonominya terbuka, dan mempercepat kemajuan di Korea Utara. Kita di Indonesia mendukung mereka melakukan itu," jelas Fahri. ■ eko/sf

Perkuat Fundamental Ekonomi Hadapi Pelemahan Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah. Bahkan Jumat (29/6) pagi ini, mengutip data dari Reuters, dolar AS sudah berada di level Rp14.410. Sejumlah pihak menyebutkan penguatan ini terjadi akibat kondisi eksternal mulai dari ekspektasi kenaikan bunga acuan The Federal Reserve hingga kekhawatiran perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Terkait hal tersebut Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, pelemahan nilai tukar rupiah ini tak bisa terus menyalahkan kondisi eksternal. Kendati kondisi global cukup mempengaruhi nilai tukar rupiah, namun Taufik menilai jika fundamental ekonomi diperkuat, ia yakin rupiah akan bertahan melawan 'keperkasaaan' dolar AS. Sejumlah mata uang negara lain yang juga melemah, tak bisa dijadikan alasan Indonesia harus bernasib sama.

"Kondisi global memang memberikan pengaruh pada ekonomi kita, khususnya nilai tukar rupiah. Tapi bukan berarti rupiah tak bisa melawan dolar AS. Fundamental ekonomi kita harus diperkuat, agar mampu menahan kuatnya dolar AS. Dengan penguatan fundamental ekonomi, dan berbagai kebijakan, saya rasa rupiah bisa kembali menguat," kata Taufik dalam keterangan persnya kepada Parlemen, Jumat (29/6).

Taufik menambahkan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus siaga menghadapi pelemahan rupiah ini. Bahkan tak terus-terusan menganggap ini sebagai sesuatu yang normal atau hanya berlangsung secara musiman. BI harus memberikan intervensi, dan segera memberikan kepastian

mengenai kebijakan suku bunga pasar yang baru. Pasalnya, saat ini pasar menunggu kebijakan suku bunga bunga dari BI.

"Pelemahan ini jangan terus-terusan dianggap hal yang normal. Pemerintah dan BI harus fokus memperkuat penguatan fundamental ekonomi, sehingga muncul kepercayaan stakeholder dan investor. Dengan adanya kepercayaan dari investor, maka outflow dana juga dapat diredam. Selain itu, dampak dari melemahnya rupiah juga berdampak beban pembayaran utang. Ini harus diwaspadai," tegas politisi PAN itu.

Kondisi global memang memberikan pengaruh pada ekonomi kita, khususnya nilai tukar rupiah. Tapi bukan berarti rupiah tak bisa melawan dolar AS. Fundamental ekonomi kita harus diperkuat, agar mampu menahan kuatnya dolar AS. Dengan penguatan fundamental ekonomi, dan berbagai kebijakan, saya rasa rupiah bisa kembali menguat



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Foto: Rumi/hr

Mengutip data perdagangan Reuters, nilai tukar dolar AS terus menguat sejak awal tahun 2018. Dolar AS pada Januari berada di level Rp 13.560 dan sempat turun ke Rp 13.284. Memasuki Februari, dolar AS kembali menguat ke level Rp 13.665 dan sempat turun ke Rp 13.555. Dolar AS juga kembali menguat hingga level Rp 13.689.

Tren penguatan dolar AS berlanjut di bulan berikutnya. Pada Maret, dolar AS berada di level Rp 13.874 dan bergerak tidak terlalu jauh hingga April di level Rp 13.770. Pada Mei, dolar AS semakin perkasa terhadap rupiah. Dolar AS berada di level Rp 13.937 hingga menyentuh Rp 14.027 dan sempat turun lagi ke Rp 13.946.

Pelemahan dolar AS tidak berlangsung lama, mata uang Paman Sam kembali menguat terhadap rupiah ke level Rp 14.084 hingga Rp 14.213. Setelah itu, dolar AS perlahan turun cukup dalam ke level Rp 13.841 namun selanjutnya terus mengalami penguatan hingga akhir Juni ini. ■ dep/sf

Fahri Usul Kampanye Pilpres Dibiayai Negara

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan pembiayaan untuk kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) diambil alih negara. Mekanisme penggunaan dana kampanye juga harus jelas supaya tidak ada penyimpangan di lapangan.

“ Yang saya katakan adalah, apabila pembiayaan politik itu kepada kandidat presiden tidak diambil-alih oleh negara, maka akan datang orang-orang yang menawarkan bantuan kepada kandidat,” ujar Fahri kepada wartawan baru-baru ini.

Dengan kondisi demikian, maka kandidat yang akan mendapatkan tawaran fasilitas paling banyak adalah mereka yang sedang berkuasa. Pasalnya, yang sedang berkuasa punya tanda tangan, punya kewenangan yang semua itu bisa menyebabkan terjadinya korupsi politik.

Diakuinya, metode penggalangan dana politik (Fund Rising Pilpres) yang dipaparkannya pada media itu, saat ini memang cukup rumit dan tidak mudah dipahami. Sehingga dirinya khawatir sejumlah media salah dalam mengutip pernyataannya.

“Jadi kemarin, saya sedang mengomentari dilema *fund rising* Pilpres kepada teman-teman wartawan, Maka saya uraikan secara panjang lebar. Sebab

saya termasuk menulis tema ini sebagai cara menghentikan kasus korupsi terutama korupsi politik. Sebab, korupsi politik itu akarnya ada pada pembiayaan politik, dan korupsi politik itu tidak bisa ditemukan oleh audit karena modulusnya adalah persekongkolan,” paparnya.

Ditambahkannya, memang tidak semua *fund rising* Pilpres ilegal. Karena itu semakin sulit dilacak dan ditemukan. Ini salah satu penyakit sistem demokrasi. Oleh sebab itu, menurutnya jika sistem *fund rising* Pilpres dibiarkan mengambang, maka semua orang akan mencari cara untuk mencari pembiayaan. Biaya Pilpres itu bagian dari cara perang. Bahkan dianggap sebagai alat perang utama.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan akan melakukan penggalangan dana lewat akun Facebook resminya. Ia mengatakan jika Partai Gerindra membutuhkan dukungan dan donasi dari masyarakat pendukungnya.



Foto: Andri/od

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Bahkan Prabowo mengatakan telah menyiapkan nomor rekening yang bisa digunakan untuk menampung bantuan dari para pendukungnya. Berapapun nilai bantuan yang dikirimkan akan sangat membantu perjuangan Gerindra. Hal tersebut juga pernah dilakukan dalam Pilpres 2014 lalu oleh Pasangan Jokowi - JK dengan gerakan yang dinamai “Gerakan 1.000 Rupiah Jokowi-JK untuk Perubahan Indonesia”. ■ ayu/sc

Taufik Kurniawan Ingatkan Netralitas Aparatur Negara pada Pilkada Serentak

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan kembali mengingatkan pemerintah dan aparatur negara dalam menjaga netralitas dan kredibilitas pada Pilkada serentak di 171 daerah. Pemerintah dan aparatur negara pun diminta untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara dalam upaya memenangkan calon pasangan kepala daerah tertentu.

“ Pilkada serentak ini menjadi Pilkada serentak ke tiga dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang menjadi kekurangan pada Pilkada serentak sebelumnya, bisa menjadi evaluasi dan kita harap tidak terjadi lagi pada Pilkada serentak besok. Kita harapkan, pemerintah dan aparatur negara, dalam hal ini PNS, untuk menjaga netralitas dan integritas,” kata

Taufik dalam keterangan persnya, Senin (25/6).

Taufik menuturkan, Pilkada ini menjadi momentum penting bagi setiap warna negara menentukan kepemimpinan di daerahnya. Sehingga, setiap pihak maupun seluruh lapisan masyarakat memiliki fungsi masing-masing untuk menyukseskan Pilkada.

Ia juga mengingatkan kepada para

Kepada seluruh masyarakat, kami juga mengingatkan agar saling menghormati jika ada perbedaan pilihan. Jangan sampai ada keributan, bahkan permusuhan antar pendukung calon kepala daerah karena terpicu kampanye hitam.

DPR Dukung Asian Games 2018 Sejak Konsep Anggaran

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyampaikan bahwa DPR memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal dan mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia. Bukti nyata dukungan tersebut dimulai sejak dari hulunya yaitu ketika pengambilan keputusan di Komisi X DPR, dimana hampir tidak ada yang split decision artinya keputusannya bulat.

“Di tingkat Pimpinan kita selalu aktif bertemu dengan menteri untuk mengadvokasi dan mengawal jalannya Asian Games 2018 ini agar dapat berjalan sukses. Dari hulunya kita mendukung, yakni mulai dari konsep penganggaran. Ini adalah penganggaran terbesar yang pernah ada untuk program even olahraga. Dari mulai konsep anggaran ke detil teknis lainnya seperti venue, marketing, sosialisasi, persiapan tim menjadi bagian yang kita dukung,” tegas Utut di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7).

Utut mengatakan, yang hebat dari penyelenggaraan even Asian Games dan ASIAN Para Games, ke depannya diharapkan even olahraga dapat menjadi industri di Indonesia. Utut juga berharap Indonesia sebagai tuan rumah mampu memperbaiki peringkatnya di level Asia.

“Pada periode terakhir posisi Indonesia berada pada ranking 17 dengan 4 medali emas. Namun yang paling penting dari olahraga ini adalah karakter bangsa kita dapat menjadi kuat, karena olahraga

mengajarkan kita bahwa tidak ada sesuatu yang didapat dengan cara instan,” ujarnya.

Dikatakannya, dari even besar ini akan ada perbaikan ditata nilai. Sementara untuk mencapai keberhasilan itu diperlukan jangka waktu yang panjang. “Asian Games ini adalah momentum dimana olahraga menjadi industri. Setelah Asian Games, mata anak-anak muda yang sekarang semata-mata hanya untuk IT atau hal-hal yang hip hop, kembali ada yang mau menekuni dunia olahraga,” ucap politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Terkait venue, Utut menyatakan tidak perlu ada yang harus dikhawatirkan, karena diperkirakan pada minggu ketiga bulan Juli semua telah siap. Menurutnya, yang perlu dijaga adalah masalah kesemrawutan, sebab seringkali persoalan kesemrawutan terutama di lapangan terjadi akibat tidak ada komando yang jelas.

“Walaupun hal ini adalah teknis



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto

Foto: Anatri/od



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Foto: Anatri/od

calon kepala daerah untuk menjaga sportivitas dalam Pilkada serentak ini. Taufik pun berharap, selama masa tenang ini tidak ada kampanye hitam, kecurangan, bahkan politik uang. Adanya Pilkada serentak juga diharapkan tidak memecah belah masyarakat karena adanya perbedaan pilihan.

“Kepada seluruh masyarakat, kami juga mengingatkan agar saling menghormati jika ada perbedaan pilihan. Jangan sampai ada keributan, bahkan permusuhan antar pendukung calon kepala daerah karena terpicu kampanye hitam. Terakhir, kita harap Pilkada serentak tahun ini berlangsung luber, jurdil, serta menghasilkan kepala daerah yang terbaik,” harap politisi PAN itu.

■ ann/sf

dasar di organisasi, tetapi karena melibatkan banyak volunteer dan orang baru pertama kali kerja sama, ini menjadi titik yang ruwet. Asian Games ini diharapkan menjadi modal besar untuk membuat kita bisa berkoordinasi lebih baik lagi. Selain itu, titik rawan lainnya adalah pada masalah pengaturan lalu lintas,” terangnya.

Sejauh ini Utut menilai bahwa minat masyarakat terhadap penyelenggaraan Asian Games 2018 masih tergolong kurang antusias. “Masyarakat hanya antusias untuk even politik. Oleh karenanya harus ada ‘Hero’ di olahraga. Membawa orang untuk satu pikiran dalam olahraga merupakan pekerjaan sulit sekarang. Apalagi tanggal 18 Agustus berhimpitan dengan even politik, yakni pencapresan dan pencawapresan,” katanya.

Utut menghimbau agar pihak Inasgoc dapat lebih pintar dalam mencari kreasi. “Sebab kalau tidak, olahraga akan sepi. Ini fakta lapangan bukan kita pesimis,” tandasnya. ■ dep/sc



SB Wiryanti Sukamdani saat memimpin Tim Kunjuran Komisi X DPR RI ke NTB

Foto: Suci/od

Komisi X Apresiasi Pemprov NTB Kembangkan Wisata Halal

Komisi X DPR RI apresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan wisata halal di NTB, khususnya di Pulau Lombok. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjuran Kerja Komisi X DPR RI SB Wiryanti Sukamdani.

“Komisi X merasa sangat terkesan dengan perkembangan dan kemajuan pariwisata di NTB, khususnya di Pulau Lombok yang memiliki destinasi-destinasi wisata yang terkenal sangat indah baik pantainya, lembah, gunung, adat dan budaya serta kuliner,” kata Wiryanti dalam sambutannya saat pertemuan dengan Sekda Pemprov NTB dan Kepala Dinas Pariwisata NTB di Kantor Dinas Pariwisata Lombok, NTB, Jumat (29/6).

Sebagaimana diketahui, sambung Yanti sapaan akrab Wiryanti, saat ini NTB khususnya Pulau Lombok sedang

mengembangkan konsep wisata halal, yang berfokus pada peningkatan pelayanan kepada seluruh wisatawan yang datang tanpa mengenal zonasi.

“Selain itu NTB merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pariwisata halal yang tertuang dalam Perda No.2/2016, yang disahkan pada 21 Juni 2016,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Perda ini, menurut Yanti sangat membantu dalam legitimasi hukum terkait wisata halal, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan khususnya

dalam bidang akomodasi dengan menyediakan kebutuhan wisatawan terkait peribadatan selama berkunjung ke Lombok hingga sajian kuliner halal yang telah tersertifikasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata NTB HL Moh. Faozal menyatakan program pariwisata merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi NTB di era kepemimpinan Gubernur TGH M Zaenul Majdi.

“Perkembangan pariwisata yang terjadi saat ini merupakan sinergitas dari para pemangku kepentingan bersama pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa,” papar Faozal.

Ia menyampaikan, bahwa apa yang dilihat saat ini adalah hasil sinergi dari para pemangku kepentingan pariwisata di NTB bersama pemerintah daerah. Dapat dilihat juga dengan semakin banyaknya properti

hotel yang hadir baik di kawasan Senggigi maupun Gili di Kabupaten Lombok Utara.

“Selain itu, infrastruktur sebagai pendukung yang dibutuhkan seperti akses jalan ke destinasi yang ada juga sudah sangat memadai, sehingga akan memudahkan akses wisatawan menuju ke destinasi tersebut,” terangnya.

Terkait wisata halal, sambungnya, kita patut bersyukur. Sejak dijadikan branding wisata halal di NTB, ia menginformasikan NTB telah berhasil memperoleh penghargaan, baik nasional bahkan internasional. Antara lain pada 2016 mendapatkan penghargaan *World's Best Halal Tourism Destination*, *World's Best Halal Honeymoon Destination*, dan *Wonderful Lombok Sumbawa* (Website Travel Ramah Wisatawan Muslim Terbaik). Sementara pada tahun 2015, meraih penghargaan internasional sebagai *The Best Halal Destination* dan *The Best Halal Honey Destination*.

Sementara itu dalam sambutannya, Sekda NTB H. Rosyadi Sayuti menyampaikan keberhasilan Pemprov NTB dalam mengembangkan sektor pariwisata, adalah kerja kolektif atau sinergitas dari seluruh pemangku kebijakan di NTB dan para pelaku usaha wisata, termasuk para pengusahanya. Termasuk dukungan yang tidak berhenti yang dilakukan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI.

“Berbagai destinasi wisata yang ada di NTB telah dikunjungi oleh ratusan ribu wisatawan mancanegara dan ratusan ribu wisatawan nusantara. Dengan kerja keras dan cerdas yang kita lakukan. Ke depan kita harapkan jumlah wisatawan berkunjung yang oleh Kemenpar ditargetkan sebanyak 4 juta wisatawan, akan terwujud,” harap Rosyadi.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pariwisata yang diwakili Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dadang Rizki Ratman menyerahkan Sertifikat Bantuan Pengembangan Pariwisata sebesar Rp227,4 miliar. Bantuan ini diharapkan mampu mengembangkan SDM Pariwisata NTB.

Setelah pertemuan dengan Sekda dan Kadis Pariwisata, Tim Komisi X mengunjungi Masjid Hubbul Wathan Islamic Center untuk sholat Jum'at, kemudian ke Desa Sade dan kunjungan berakhir di Kuta Beach Park the Mandalika.

Turut serta dalam kunjungan tersebut Anggota Komisi X antara lain Hj. Popong Otje Djundjungan, Dwita Ria Gunadi, Venna Melinda, Hj. Lathifah Shohib, H. Mustafa Kamal, Hj. Ratih Sanggarwaty, Dadang Rusdiana, dan Hj Yayuk Sri Rahayuningsih.

■ sc



Foto: Sugeng/od

Tim Kunker Komisi X DPR RI bersama Bupati Banyuwangi Abdulah Azwar Anas

Komisi X DPR Terkesan Perkembangan Pariwisata Banyuwangi

Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata mengaku terkesan dengan perkembangan pariwisata daerah di ujung Pulau Jawa tersebut.

“Kedatangan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR di Banyuwangi untuk mendapatkan studi empiris referensi tentang pengembangan pariwisata daerah. Sekaligus melakukan konfirmasi tentang pesatnya perkembangan pariwisata di daerah ini,” ujar Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Fakhri kepada wartawan, di Banyuwangi, Jumat (29/6).

Menurutnya, selama ini Banyuwangi sering disebut-sebut oleh Kementerian Pariwisata di ruang sidang tentang contoh pengembangan pariwisata dari nol hingga mendatangkan banyak wisatawan. “Kami ingin mengkonfirmasi langsung semua informasi ini,” ungkapnya.

Tim Kunker Komisi X DPR tersebut mengunjungi sejumlah lokasi di Banyuwangi. Mulai Lounge Pemkab Banyuwangi, Mal Pelayanan Publik, dan Pendopo Kabupaten. Tim juga mendatangi beberapa destinasi wisata seperti Villa Solong dan Bangsring Underwater serta melihat progres pembangunan hotel bintang empat baru.

Tim juga mendapatkan penjelasan dari Bupati Banyuwangi Abdulah Azwar Anas tentang atraksi pariwisata Banyuwangi Festival yang dikembangkan daerah hingga cara Banyuwangi membangun aksesibilitas dan amenitas pariwisata.

Dia menambahkan, Komisi X DPR melihat meskipun aksesibilitas di Banyuwangi masih terus berproses tapi Banyuwangi punya atraksi pariwisata yang menarik. Banyuwangi juga percaya diri dengan keasliannya untuk menarik wisatawan terutama dari mancanegara dan cara ini berhasil.

Dia menambahkan, dengan segala keterbatasannya Banyuwangi mampu maju, ini patut dicontoh daerah lain. “Apa yang kami dengar tentang Banyuwangi sudah terkonfirmasi dengan kehadiran kami di sini,” ujar Fikri. ■ si

Keikutsertaan Perempuan Dalam Pilkada Diapresiasi

Keikutsertaan perempuan dalam Pilkada Serentak 2018 secara kuantitatif mengalami peningkatan. Fakta ini diapresiasi oleh Anggota DPR RI Okky Asokawati yang merespon para calon pemimpin perempuan di berbagai daerah. Jumlah perempuan yang menjadi kandidat kepala daerah maupun wakil kepala daerah di semua tingkatan sebesar 8,89 persen atau 101 calon perempuan dari total 1.136 kandidat.



Anggota DPR RI Fraksi PPP Okky Asokawati

Foto: Oajje/od

“ Bila melihat data Pilkada Serentak sebelumnya, tren kemenangan kandidat perempuan mengalami peningkatan dari 28 persen di Pilkada Serentak 2015 menjadi 31 persen keterpilihan kandidat perempuan di Pilkada Serentak 2017 lalu. Untuk Pilkada Serentak 2018 ini, harapan saya sejumlah kandidat perempuan akan mengalami peningkatan dari sisi kemenangan,” ucap Okky dalam rilisnya, Kamis (28/6).

Dari 17 Pilgub yang digelar, merujuk data hitung cepat, setidaknya terdapat tiga figur perempuan yang unggul

suaranya baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Di Jawa Timur ada Khofifah Indar Parawansa, untuk Cagub, Chusnunia Halim untuk Cawagub Lampung, dan Siti Rohmi Djalilah untuk Cawagub NTB. Okky mengaku bangga kepada para ibu yang unggul dalam kontestasi Pilkada versi hitung cepat ini.

Ditambahkannya, jika melihat latar belakang kandidat perempuan yang muncul dalam perhelatan Pilkada

Serentak tahun 2018 ini, sebanyak 43 persen merupakan kader partai, 39 persen mantan anggota parlemen, dan 39 persen memiliki kekerabatan dengan pimpinan partai atau kepala daerah. Dari data tersebut dapat dijadikan rujukan bagi pimpinan partai politik untuk meningkatkan keterlibatan

LRT Palembang Tak Terkoneksi Angkutan Massal

Light rail transit (LRT) di Palembang ternyata merupakan angkutan umum yang diperuntukkan bagi orang kaya. LRT ini hanya terkoneksi ke bandara setempat, tidak terkoneksi dengan angkutan publik massal. Jadi, masyarakat miskin tak bisa mengakses LRT tersebut, karena tujuannya hanya ke bandara yang biasa dimanfaatkan oleh orang-orang kaya.

Demikian kritik tajam Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat ditemui di ruang kerjanya Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6). Proyek LRT yang rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 15 Juli nanti itu, telah menelan biaya Rp10,9 triliun. Bahkan, anggarannya ditambah lagi Rp126 miliar untuk kebutuhan selama enam bulan ke depan.

“Ini kebijakan yang salah dari pemerintah. LRT bukan angkutan transportasi bagi rakyat kecil, karena tidak terkoneksi dengan angkutan massal lainnya seperti terminal, pelabuhan, dan stasiun. Jadi, ini sebenarnya angkutan untuk orang kaya. Itu sama saja memberi subsidi bagi golongan masyarakat kaya dan tentu saja tidak tepat sasaran. Mestinya subsidi hanya untuk orang miskin,” kritik Bambang.

Untuk mengoperasikan LRT,



Foto: Jaka/od

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono

perempuan dalam partai politik dengan menempatkannya pada posisi penting.

Penempatan perempuan, sambung Politisi PPP ini, sebagai anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat, sangat efektif untuk menjadi pintu bagi politisi perempuan mengisi pos jabatan eksekutif sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. “Kendati kandidat perempuan dalam Pilkada ini tidak dominan, namun harapannya persoalan tentang perempuan yang terjadi di daerah harus tetap menjadi perhatian kandidat terpilih,” harap Anggota Komisi IX DPR ini.

Persoalan perempuan yang dimaksud adalah kesehatan ibu dan anak, keterlibatan perempuan di sektor ekonomi, dan perlindungan perempuan dari potensi kekerasan. Semua ini harus menjadi perhatian kepala daerah terpilih. Menurut Okky, secara umum dibutuhkan perubahan kultur dan persepsi atas keberadaan politisi perempuan yang mengisi pos-pos jabatan publik baik di eksekutif maupun legislatif.

“Kesadaran pentingnya perempuan tampil di ruang publik dan politik harus senantiasa ditumbuhkan oleh seluruh *stakeholder* baik pemerintah, partai politik, termasuk kalangan perempuan sendiri,” tutupnya. ■ mh/sc

dibutuhkan energi listrik yang besar. Sembilan gardu dioperasikan untuk menyuplai kebutuhan 4,3 juta volt ampere. Per jam membutuhkan sekitar Rp80 juta atau Rp1,6 miliar per hari dengan generator solar bersubsidi. Menurut Anggota F-Gerindra ini, proyek yang dibiayai APBN sebesar Rp10,9 triliun itu, bila dikonversi untuk pengadaan rangkaian kereta, bisa membeli 1200 gerbong penumpang dan 3600 gerbong barang.

Bila rangkaian kereta sebanyak itu, lanjut Bambang, disebarkan ke seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan transportasi massal, betapa hebatnya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tumbuh hebat. Apalagi, bila anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk pengadaan bus dan truk pengangkut penumpang maupun barang, bisa semakin banyak unit yang dibeli dan sebar ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. “Proyek nasional LRT tersebut hanya memboroskan anggaran,” tutup Bambang lagi. ■ mh/sc

Kerja Sama Sosial Indonesia - Timor Leste Menjadi Prioritas

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha memandang kerja sama sosial dan budaya antara Indonesia dengan Timor Leste bisa menjadi prioritas. Baginya mahasiswa Timor Leste yang ada di Indonesia dengan jumlah sekitar 4195 orang, bisa meningkatkan hubungan *people to people diplomacy* antara kedua negara. Dengan baiknya hubungan *people to people*, maka akan terjalin hubungan persaudaraan antara kedua belah pihak.



Foto: Andri/oc

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha

Jika hubungan ini terjalin secara lancar, tentunya bisa menunjang kerja sama di bidang lain, seperti ekonomi dan politik. Hal tersebut dia sampaikan usai mendampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Pimpinan DPR RI lainnya menerima kunjungan Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6).

“Menurut saya kerja sama sosial *people to people* harus ditingkatkan. Karena Indonesia dengan Timor Leste punya sejarah panjang. Kalau kita sudah bisa menyelesaikan *people to people contact*, sehingga tidak ada lagi

perbedaan antara kita dengan Timor Leste, maka rasa permusuhan tidak ada, dan yang ada adalah rasa persaudaraan. Kita menyambut baik peningkatan sumber daya manusia, itu menjadi hal prioritas,” papar Satya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, kerja sama kedua negara harus memiliki visi ke depan yang sama-sama saling menguntungkan. Berkaitan dengan masa lalu, seyogyanya tidak perlu lagi dibesarkan. Karena yang terpenting adalah masa depan kerukunan, pembangunan, dan kesejahteraan kedua negara.

Yang tidak kalah penting menjadi perhatian Satya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi Timor Leste dengan mengembangkan investasi Indonesia yang ada di sana. Dia mengharapkan kedua belah pihak bisa melakukan peningkatan kerja sama ekonomi, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kerja sama di sektor minyak dan gas bumi.

Dia mengatakan di Timor Leste ada Timor Gate, yang dulu jadi bagian dari Indonesia. Sekarang sebagian kecil ada di Indonesia sebagian besar ada di Timor Leste, Satya menyarankan itu harus dikerjakan dengan baik.

“Nanti kita harapkan kedua belah pihak bisa melakukan satu peningkatan kerja sama ekonomi, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kerja sama di sektor minyak dan gas bumi,” harap politisi dapil Jawa Timur itu. ■ eko/sf

RUU Penyadapan Akan Ditata Komprehensif

Rapat Badan Legislasi DPR RI dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, telah mendengarkan pemaparan hasil studi dari Badan Keahlian Dewan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Supratman menyampaikan, DPR berusaha menata RUU Penyadapan secara komprehensif, termasuk di dalamnya tentang aturan izin penyadapan oleh pengadilan.

“Penyadapan tidak memerlukan izin pengadilan, kenapa ini perlu diatur dalam undang-undang, supaya tidak menimbulkan kerancuan sekaligus kita ingin menata penyadapan ini secara komprehensif,” papar Supratman di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6).

Dia menjelaskan, RUU Penyadapan akan mengatur tentang persyaratan penyadapan, termasuk audit pertanggungjawaban tentang kegiatan menyadap. Sehingga sekalipun tidak memerlukan izin pengadilan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pemberantasan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), namun aturan penyadapan butuh payung hukum. “Jadi mulai dari persyaratan

penyadapannya, termasuk auditnya nanti kita atur secara komprehensif di dalamnya,” ujar Supratman.

Di sisi lain, Anggota Baleg Hermanto menekankan tentang penyadapan harus memegang prinsip perlindungan hukum, keadilan hukum, keseimbangan, dan keterbukaan. “Azas ini perlu penerapan secara konsisten, artinya dalam penyadapan tidak dilakukan secara pilih kasih. Sehingga penyadapan hanya demi penegakan hukum,” tegas Hermanto.

Selain itu dia juga mengatakan, tindakan penyadapan perlu diawasi sebab ini berkaitan dengan privasi. Hermanto mewanti-wanti agar RUU ini jangan sampai memberi celah adanya rekayasa dalam penyadapan. “Sebab kadang-kadang menyasar, tidak tepat sasaran. Bahkan ada rekayasa. Saya mau tanya seberapa jauh undang-undang ini mengantisipasi adanya



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas

Foto: Azika/od

rekayasa penyadapan,” ungkap Hermanto.

Menanggapi tentang pengawasan penyadapan, Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menyampaikan konsep yang disusun BKD, pengawasan penyadapan diberikan kepada masing-masing lembaga penegak hukum. “Konsep yang kami coba rumuskan di dalam naskah akademik kita serahkan kepada masing-masing lembaga penegak hukum sendiri,” jelasnya.

Dia beralasan ini demi menjaga independensi setiap lembaga. Menurut studi yang dilakukan BKD kalau pengawasan diserahkan secara internal, kebocoran informasi bisa lebih minim. ■ eko/sc

Pengabdian ASN Selama Puluhan Tahun Jadi Prestasi dan Inspirasi

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) DPR RI yang memasuki masa Purna Bakti TMT 1 Juli 2018 untuk bersyukur. Sebab dapat menjalani pencapaian tertinggi di lingkungan birokrasi dalam keadaan baik. Mengingat tidak semua ASN memiliki kesempatan yang sama, dikarenakan pensiun dini, sakit, dan meninggal dunia.

“Mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri acara hari ini. Karena tidak semua ASN dapat mencapai usia pensiun,” ajak Totok, sapaan akrab Setyanta, saat pelepasan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menjelang

masa purna bakti, di Gedung Setjen dan BK DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6).

Totok menjelaskan bahwa acara pelepasan ini merupakan bentuk apresiasi dari institusi atas pengabdian dan loyalitas pegawai selama puluhan tahun. Ia menilai ini merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan yang mampu memberikan inspirasi pegawai yang masih aktif untuk



Foto: Runit/od

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha saat pelepasan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

DPRD Kabupaten Sleman Konsultasikan Sejumlah Persoalan Terkait Tatib

Kepala Biro Persidangan II Setjen DPR RI Cholida Indryana didampingi Kepala Bagian Badan Legislasi menerima audiesi Pansus I DPRD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pansus I DPRD Sleman datang untuk mengkonsultasikan terkait Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sleman.



Kepala Biro Persidangan II Setjen DPR RI Cholida Indryana menerima audiesi Pansus I DPRD Kabupaten Sleman

DPRD Kabupaten Sleman yang tengah merampungkan perubahan tatib mengajukan sejumlah pertanyaan guna

semakin semangat bekerja.

Untuk itu, ia mewakili keluarga besar Setjen dan BK DPR RI, Korps Pegawai RI (Korpri), Persatuan Pegawai Pensiunan Setjen (P3S) DPR RI dan Dharma Wanita, Totok mengucapkan terimakasih atas sumbangan tenaga, ide, kreativitas dan pikiran selama puluhan tahun untuk instansi ini.

“Pada kesempatan ini saya dan keluarga besar Setjen dan BK DPR RI, Korpri, P3S dan Dharma Wanita mengucapkan terima kasih atas sumbangsih teman-teman. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan dan inspirasi bagi pegawai yang masih aktif, semoga bisa menyamai atau bahkan melebihi pengabdian teman-teman sebelumnya,” ujar Totok.

Ia juga berharap agar lima pegawai calon pensiunan per 1 Juli 2018 ini, ke depannya dapat menjalani hari dengan suka cita, meningkatkan silaturahmi, dan menyalurkan hobi yang selama ini tertahan. Sementara untuk pegawai yang masih

menambahkan masukan dan referensi pembahasan. Diantaranya mekanisme tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mekanisme pembahasan raperda, dan mekanisme penjadwalan DPRD.

Menjawab pertanyaan dari DPRD Sleman

tersebut, Iin sapaan akrab Cholida menyatakan mekanisme pemilihan kepala daerah harus memperhatikan UU tentang Pemilihan Kepala Daerah. “Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

ingin berkarya, Totok mengajak untuk bergabung dalam organisasi P3S yang merupakan wadah bagi pensiunan DPR untuk melakukan berbagai kegiatan sosial dan ajang silaturahmi.

“Bagi teman-teman yang sudah pensiun dan masih ingin berkarya, silahkan gabung dengan teman-teman di P3S. Selain untuk mengisi kegiatan dengan hal-hal positif, juga sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi,” kata Totok.

Lima pegawai yang memasuki masa purna bakti TMT 1 Juli 2018 itu yakni Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara Hartono, Kepala Subbagian Analisis Media Ahyar Tibi, Analis Data dan Informasi Kalpika Hendra, Teknisi Sarana dan Prasarana Teddy Kurniadi, dan Pemelihara Sarana dan Prasarana Holidi. ■ *apr/sf*

Daerah harus memperhatikan UU tentang Pemilihan Kepala Daerah,” jelasnya di Gedung Sekeretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6).

Hal tersebut dilakukan guna menselaraskan antara UU dan Tatib, agar tidak bentrok dan menjadi masalah di kemudian hari.

Sementara itu, Kepala Bagian Badan Legislasi Widiarto menjelaskan bahwa perubahan tata tertib di DPR bisa berasal dari anggota atau alat kelengkapan dewan (AKD), dan Badan Legislasi (Baleg). Jika perubahan tatib berasal dari anggota atau AKD usulan perubahan tatib harus mendapat persetujuan dari Pimpinan DPR kemudian diputuskan di paripurna. Sementara jika perubahan tatib berasal dari Baleg usulannya langsung dibawa ke paripurna karena sudah dilakukan harmonisasi di Baleg.

“Kalau berasal dari Baleg sudah pasti sudah dilakukan harmonisasi karena memang tugasnya. Itu mengapa betapa pentingnya baleg terkait hal ini,” ungkap Widi.

Lebih lanjut Widi menjelaskan, terkait pembahasan raperda dilakukan melalui 2 (dua) tingkat seperti pembahasan RUU di DPR. Pembahasan tingkat pertama yakni pembahasan substansi materi atau proses penyusunan dimana pada akhir pembahasan melibatkan pandangan fraksi dan alat kelengkapan dewan yang disebut dengan pandangan mini. Pada tingkat kedua, pandangan fraksi dilakukan di paripurna yang merupakan tahapan pengambilan keputusan paling tinggi.

Masa pembahasan tingkat I RUU di DPR, lanjutnya, adalah 3 (tiga) kali masa persidangan dan bisa diperpanjang. Apabila suatu pembahasan tidak selesai sampai dengan pergantian tahun anggaran maka pembahasan tersebut masuk dalam prolegnas tahun berikutnya.

“Dengan catatan perlu dikaji ulang apakah pembahasan tersebut masih relevan atau tidak. Sementara kalau periode keanggotaannya berganti maka pembahasannya berganti atau boleh dilanjutkan tapi biasanya pasti berganti,” tutupnya. ■ *apr/sc*

Sistem One Way Langgar UU

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai penerapan sistem one way dari tol Kertasari, Tegal menuju Cawang yang menyebabkan kemacetan parah di jalan arteri dan tol perlu mendapat evaluasi khusus karena berpotensi melanggar sedikitnya tiga Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP).



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

Foto: Kresno/hr

“Saya mendapat banyak keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan kebijakan one way ini. Dan saya sudah menelaah kebijakan ini. Setidaknya ada 3 UU dan PP yang dilanggar pemerintah dengan pemberlakuan kebijakan ini,” kata Sigit Sosiantomo dalam rilisnya, Kamis (22/6).

Sistem one way sepanjang 294 km dari Tegal hingga Cawang tersebut, kata Sigit, melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP No.15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang merupakan turunan dari UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam UU LLAJ, pemberlakuan sistem one way dinilai melanggar Pasal 93 dan 94 yang mengatur tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas. Dalam Pasal 93, ditegaskan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dan dalam pelaksanaannya harus sebagaimana diatur dalam Pasal 94, rekayasa lalu lintas harus melalui tahap perencanaan yang diantaranya memuat identifikasi masalah lalu lintas, analisis daya tampung jalan analisis dampak lalu lintas.

“Dari perencanaan yang disampaikan kepada Komisi V dalam raker persiapan

muluk beberapa waktu lalu, Korlantas memaparkan pemberlakuan *contra flow* dan *one way* pada arus balik hanya diberlakukan di beberapa titik, seperti Rest Area Tol Cipali (Km 130 dan Km 102) dan Tol Cikampek (Km 62, Km 52 dan Km 42). Dengan demikian, sistem one way sepanjang 294 km dari Tegal sampai Cawang ini tidak direncanakan secara matang dan dilakukan serampangan tanpa menganalisa daya tampung jalan arteri dan analisa dampak lalu lintasnya seperti yang diamanatkan UU LLAJ,” kata Sigit.

Sementara di UU Perlindungan Konsumen, sistem one way tersebut dinilai Komisi V melanggar Pasal 4 dan 7. Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dan dalam pasal 7, pelaku usaha dalam hal ini operator jalan tol berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan menjamin pemenuhan SPM.

DPR Minta Negara Produsen Minyak Kembangkan Energi Ramah Lingkungan

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi' Munawar menegaskan perlu adanya komitmen bersama dalam menekan ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dan dampak ketergantungan terhadap energi berbasis fosil.

Hal itu ia katakan saat memimpin delegasi DPR RI menghadiri sidang Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Forum Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) di Pissouri Bay, Siprus, Rabu (27/6).

“Kita sampaikan agar negara-negara produsen minyak sudah seharusnya menyadari pentingnya energi baru dan ramah lingkungan. Kita minta mereka segera membuat kebijakan terkait energi baru dan ramah lingkungan itu,” usul

Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Pada pertemuan yang dihadiri 20 parlemen dari kawasan Asia itu, Rofi' juga menyampaikan pentingnya pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai pengganti energi berbasis fosil.

Ia juga mendesak APA meneguhkan kembali komitmen global untuk menekan kenaikan suhu di bawah 2 celcius. Menurutnya, Anggota APA jangan sampai menarik diri secara sepihak dari Kesepakatan Paris seperti yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Meskipun demikian, politisi PKS itu turut mengingatkan bahwa dalam menjaga lingkungan hidup jangan sampai menghambat kerja sama perdagangan.

“Saya juga mengingatkan bahwa berfokus kepada masalah lingkungan hidup, jangan kemudian jadi penghambat kerja sama perdagangan dan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi, utamanya negara-negara berkembang menjadi sangat penting. Di sini kita memerlukan saling pengertian antar negara di dunia,” pungkasnya. ■ ann/sf

“Ada hak konsumen pengguna jalan tol yang dilanggar dengan pemberlakuan sistem *one way* ini. Pertama, perlakuan diskriminatif operator yang memberikan kemudahan pada arus balik, tapi menelantarkan pengguna tol lainnya yang arahnya berlawanan. Padahal sama-sama bayar. Kedua, jelas sekali SPM jalan tol tidak terpenuhi. Kemacetan berkilo-kilo meter bahkan pengguna tol sampai harus tidur di badan jalan jelas membuktikan SPM tidak terpenuhi,” kata Sigit.

Kebijakan *one way* tersebut, kata Sigit, juga tidak disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang sudah terlanjur antre di gerbang tol terpaksa merasakan tidur di area jalan tol dan merasakan kemacetan parah sehingga waktu tempuh bertambah 6-8 jam.

Atas buruknya *traffic management* yang diterapkan pemerintah dalam arus balik ini, Sigit meminta pemerintah lebih memperhatikan pengintegrasian antar moda transportasi serta optimalisasi dan revitalisasi angkutan massal.

“Pemerintah seharusnya tidak cepat puas dan berbangga hati karena sudah berhasil membangun tol trans Jawa. Tol ini bukan solusi satu-satunya untuk mengurangi kemacetan dan waktu tempuh. Pengintegrasian antara moda transportasi darat, laut, udara dan kereta harus jadi prioritas pembangunan masa depan. Begitu pula dengan revitalisasi angkutan massal.” kata Sigit. ■ *hs/sc*



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi' Munawar

Foto: Odjje/hr



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf bersama Pimpinan DPR RI dan Pimpinan AKD saat berdialog dengan Presiden Timor Leste

Foto: Jayadi/od

Indonesia Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan Indonesia mendukung penuh pencalonan Republik Demokratik Timor Leste sebagai Anggota Asosiasi Negara-negara se-Asia Tenggara (ASEAN).

Demikian diungkapkan Nurhayati usai mendampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Pimpinan DPR RI lainnya menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6).

“Indonesia selalu mendukung pencalonan Timor Leste ke ASEAN, sementara di tingkat legislatif kami juga berharap Parlemen Timor Leste bisa aktif di forum-forum antar parlemen seperti AIPA dan IPU,” papar Nurhayati yang juga menjabat sebagai Presiden *International Humanitarian Law* (IHL) itu.

Politisi Partai Demokrat ini lebih lanjut menuturkan, Indonesia akan selalu membuka diri terhadap Timor Leste, dengan adanya komitmen bersama untuk saling mendukung di tingkat eksekutif maupun legislatif. Termasuk hubungan kedua parlemen yang diharapkan semakin baik,

Sebagai bentuk dukungan Indonesia, lanjutnya, parlemen Indonesia turut mengundang parlemen Timor Leste agar hadir dalam Forum Parlemen Dunia ke-II yang akan diselenggarakan di Bali pada 12 – 13 September mendatang. Forum tersebut merupakan inisiasi DPR RI demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Presiden Guterres dalam kunjungannya menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Sebagai negara tetangga, ia juga menyatakan keinginannya untuk senantiasa bergandengan tangan dengan Indonesia. Bahkan dirinya menginginkan Parlemen Timor Leste bisa belajar serta bertukar pandangan dengan Parlemen Indonesia.

Di pelbagai bidang kerja sama yang masih tertunda, Presiden Guterres optimis pemerintah Indonesia dan Timor Leste akan berjalan bersama serta mencari solusi yang tepat. Menurutnya, sebagai negara yang bertetangga, kedua negara tentu memahami apa yang menjadi kebutuhan bersama. ■ *ana/sf*



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat Halal Bihalal

Foto: Andri/od

Halal Bihalal Sarana Pererat Tali Silaturahmi

Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI menggelar halal bihalal dengan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah ini, diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi, baik antara Dewan dengan pegawai, maupun kepada sesama pegawai.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI untuk saling menjaga silaturahmi, demi meningkatkan kembali semangat bekerja, mengingat hal itu merupakan sebagian dari ibadah.

“Marilah kita sama-sama, seluruh pejabat dan pegawai di DPR RI saling menjaga silaturahmi untuk meningkatkan kembali semangat kita bekerja, karena itu bagian dari ibadah,” ungkapnya usai acara halal bihalal di ruang Pustakaloka Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).

Dalam kesempatan tersebut, Indra juga mengatakan, bahwa momentum

halal bihalal ini merupakan suatu wadah untuk mempererat tali silaturahmi sesama Pimpinan dan Anggota DPR RI dengan pejabat serta pegawai DPR RI. Dimana menurut Indra, silaturahmi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun persaudaraan, juga dalam membangun citra DPR RI ke depannya.

“Ini untuk membangun citra kita bersama. Kita ingin DPR ini memberikan suatu kontribusi seperti yang disampaikan Ketua DPR, bahwa DPR ini harus menjadi suatu alat kontribusi bagi bangsa dan negara, terutama memasuki tahun politik ini. Kita semua harus solid dan bersama, mulai dari karyawan, pejabat, Anggota dan Pimpinan, saya kira

mungkin itu yang pertama,” ungkapnya.

Dirinya juga menginginkan, antara Pimpinan, Anggota, pejabat, dan pegawai DPR RI, semuanya memiliki semangat yang sama. “Bahwa kita ingin ke depannya, segala sesuatunya lebih baik dalam hal kinerja,” pintanya.

Terkait permintaan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang menginginkan Sekjen DPR RI melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai dan pejabat Setjen DPR RI, dengan memberikan penghargaan bagi pegawai dan pejabat yang berprestasi, dan memberikan *punishment* kepada pegawai dan pejabat yang tidak berprestasi, Indra memastikan seluruhnya sudah terjadwal dan terprogram dengan baik. Baik dari sisi substansi yang menangani legislasi maupun dari sisi pelayanan kesetjanaan.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk mengatakan, silaturahmi ini merupakan ajang untuk

saling memaafkan guna memperlancar persaudaraan.

“Dalam pekerjaan secara rutin, kita tentu melakukan kegiatan-kegiatan dimana di dalamnya banyak hal yang mungkin tidak berkenan bagi orang lain, sehingga ini waktunya untuk saling memaafkan,” ungkap Johnson.

Menyinggung sambutan Ketua DPR RI perihal harapan kinerja parlemen dalam tahun politik, Johnson sepakat untuk tetap menjaga agar suasana DPR tetap kondusif,

meskipun suhu politik di luar memanas. Sebab ada hal penting yang harus dituntaskan, sebagaimana target DPR yakni merampungkan 12 RUU yang sedang dalam pembahasan sebelum berakhirnya masa keanggotaan saat ini.

“Saya harap Pilkada dan Pilpres tidak menyurutkan kerja staf dalam melayani masyarakat dan Dewan, agar target-target kita dapat tercapai sesuai dengan apa yang Ketua DPR katakan tadi,” imbuh Johnson.

Johnson menambahkan ada

strategi khusus agar target yang telah disepakati dapat terwujud, salah satunya dengan adanya komitmen dari semua alat kelengkapan yang terlibat dalam pembahasan RUU, yakni Badan Legislasi, Panitia Khusus, Komisi, dan tentunya Anggota Dewan itu sendiri.

“Perlu diingat juga bahwa pembahasan RUU tidak hanya wewenang DPR, tetapi juga melibatkan pemerintah, sehingga juga diperlukan komitmen dari pemerintah,” imbuh Johnson. ■ **ndy,apr/sf**

Dewan Ingatkan Netralitas Polri dalam Pilkada

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengingatkan mengenai arti penting netralitas Polri dalam Pilkada yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia, Rabu (27/6). Hal ini disampaikan agar aparat dapat menghindari sikap atau tindakan yang dapat dilihat sebagai keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu.



Foto: Anief/hr

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Sebagai Anggota Komisi III yang merupakan mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia saya perlu memberikan catatan khusus dan mengingatkan mengenai arti penting netralitas Polri dalam Pilkada kali ini. Sehingga aparat dapat menghindari sikap atau tindakan yang dapat dilihat sebagai keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu. Supaya dapat dihindari pula langkah-langkah yang dapat dinilai bermuatan politis,” paparnya dalam rilis yang disampaikan kepada Parlemen, Selasa (26/6).

Ia menegaskan bahwa instrumen hukum yang mengatur netralitas Polri sudah cukup lengkap. Netralitas Polri,

lanjutnya, merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 dan TAP MPR. “Pada Pasal 30 ayat (2) hingga ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa TNI dan Polri harus netral karena tugas mereka sangat strategis.

Demikian juga pada pasal 10 Ketetapan MPR Nomor 7/MPR/2000 diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” jelas Politisi PKS ini.

Selain pada dua instrumen hukum tersebut, sambung anggota dewan dapil Kalimantan Selatan ini, netralitas Polri dalam Pilkada juga diatur dalam Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Pasal tersebut menegaskan beberapa hal, yakni Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih dan anggota Polri dapat menduduki jabatan di

luar Kepolisian, setelah mengundurkan diri atau sudah pensiun dari dinas Kepolisian. Ketentuan ini mempertegas bahwa hak politik anggota Polri untuk dapat berkontestasi dalam Pilkada hanya dapat digunakan ketika yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota aktif,” katanya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, ketentuan netralitas Polri juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Menurut Pasal 71 UU Pilkada tersebut, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri dan kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Oleh karenanya, para aparat Kepolisian harus benar-benar mengatur tindakannya dengan cermat. Jangan sampai, tindakan yang diambil akan dinilai dengan langkah politis yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak,” ungkapnya.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, netralitas Polri menjadi unsur penting. Menurut Habib, perhelatan demokrasi ini Polri diberikan peran, tugas, serta kewajiban sebagai unsur anggota pengawas, pengaman, dan pelaksana Pilkada. Oleh karenanya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut Polri harus dapat berbuat, berkehendak, dan bekerja secara baik dan netral dalam keberadaan, peran, maupun tugasnya. Dalam wujud penampilannya Polri juga dituntut harus dapat memainkan peranan yang mandiri, proporsional, dan profesional. ■ (sc)

Komisi X DPR Sesalkan Wisman di Batam Hanya 50%

Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi kota perantara (transit) bagi wisatawan mancanegara (wisman), terutama dari Malaysia dan Singapura yang hendak berwisata ke daerah lain di Indonesia. Tapi ternyata hanya 50%-60% wisatawan yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau ini dari mancanegara, sebagian besarnya adalah wisatawan nusantara.



Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah bersama Tim Kunker Komisi X ke Batam

Ada beberapa hal yang harus digali lebih dalam lagi, karena ternyata hanya 50%-60% wisatawan yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau ini dari mancanegara. Sebagian besarnya dari wisatawan nusantara. Jadi kita harus melihat, daripada kita terus-menerus membangun infrastruktur yang megah dan besar, sementara mereka (wisman) itu hadir hanya untuk sedikit belanja di sini. Kita harus mulai memikirkan bagaimana merekrut wisman sebanyak-banyaknya,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah usai melihat secara langsung wisman/wisnus di Pelabuhan Sekupang, Batam, Jum’at (29/6).

Menurutnya Batam merupakan daerah kepulauan. Maka yang harus dipikirkan, adalah bagaimana pengembangan wisata yang berkaitan dengan bahari, bagaimana mengeksplorasi alam dan juga bagaimana bisa mengembangkan sejumlah perjalanan-perjalanan wisata agar Kepulauan Riau ini menjadi tempat transit.

“Pariwisata ini sangat berkaitan

dengan perilaku. Karena itu pelatihan-pelatihan berkenaan dengan perilaku bagaimana menyambut dan melayani tamu, bagaimana kita menjaga kebersihan, itu menjadi bagian yang sangat penting. Kita tidak bisa mengandalkan dari pusat, karena itu tugas dari pemda setempat untuk mensosialisasikannya,” jelas Politisi PKS ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ledia juga menyoroti masalah *tour guide* (pemandu). Ia mengatakan, kita harus berpikir bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka (wisman) karena kesulitan terbesarnya adalah penguasaan bahasa oleh para *tour guide* itu sendiri.

“Kita tidak bisa memberi proteksi pemandu wisata kita di Indonesia, karena mereka punya keterbatasan dalam bahasa. Ini PR besar, regulasinya harus lebih diperbaiki dan pemerintah seharusnya memberikan proteksi kepada para pemandu wisata ini,” tegasnya.

Anggota dewan dapil Jabar I ini menegaskan yang menjadi pemandu wisata bagi semua wisatawan yang datang

ke Indonesia harus pemandu wisata Indonesia. “Kita harus buat regulasi agar semua, siapapun juga yang datang ke Indonesia itu harus menggunakan pemandu dari Indonesia. Pemandu dari Indonesia tentu harus meng-upgrade kemampuan berbahasanya, kemampuan untuk memberikan pelayanannya,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Buralimar mengatakan, semakin beragamnya wisatawan yang masuk tentunya pemandu wisata Kepri harus siap dengan keahlian saat memandu. “Terutama soal bahasa. Sekarang ini kunjungan wisatawan dari China dan Korea sudah mulai banyak, apalagi dibukanya rute China-Tanjungpinang,” jelas Buralimar.

Saat ini pemandu wisata yang dimiliki Kepri sudah baik dan bagus, lanjutnya. Rata-rata semua sudah memiliki lisensi untuk memandu. Hanya saja ada yang baru mulai karir sebagai pemandu. Ini yang dilatih dan diberikan sertifikat. ■(iw/sc)



Rapat Panja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah membahas asumsi dasar kebijakan fiskal, pendapatan, defisit dan pembiayaan, Senin (2/7) Foto: Andri



Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu dipimpin Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Wafiroh membahas Anggaran Pemilu, Senin (2/7) Foto: Andri



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar didampingi Kepala Biro Pimpinan DPR RI Djaka Dwi Winarko, dan Kepala Biro Pemberitaan Yohannes. O.I Tahapari membuka acara sosialisasi pemanfaatan blog dan website DPR RI bagi Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, Senin (2/7). Foto: Runi



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mau motor
Zaman now?

IKUTI LOMBA
KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY
MEME (gambar, karikatur, video)
ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA:
19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018
PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: Motor Zaman Now
Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta,
Juara III Rp 5 juta

KIRIM KE: SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN LOMBA STAND UP COMEDY

- lombakritikterbaikDPR@gmail.com
- lombakritikterbaikDPR@yahoo.com
- [@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)
- [@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)
- [@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)